

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian dalam konteks pendidikan nasional yang memiliki peran strategis bagi pembentukan karakter bangsa (*nation and character building*) di tengah heterogenitas masyarakat Indonesia. Realitas pluralitas dan heterogenitas tersebut tergambar dalam prinsip berbhineka, tetapi integrasi dalam kesatuan. Untuk itu, PKn menemukan momentumnya menjadi topik sentral dalam membangun negara bangsa Indonesia. Dengan demikian, Masyarakat multikultural Indonesia tidak bisa dibangun secara *taken for granted* atau *trial and error*, sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, *integrated* dan berkesinambungan. Salah satu strategi yang bisa dilakukan dalam konteks tersebut adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas (*citizenship education*) yang memiliki perspektif kewarganegaraan dunia abad ke-21 yang terkenal dengan sebutan kewarganegaraan multidimensi yang salah satu cirinya memiliki karakteristik multikultural (Cogan, 1998:116).

Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dimaknai bahwa PKn memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk generasi muda sebagai warga negara yang baik. Hal tersebut senada dengan pendapat Kerr yang

Candra, 2012

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

menyatakan bahwa:

Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching, and learning) in that preparatory process atau, “*citizenship or civics education* (Kerr, 1999:17)

Dari pengertian tersebut, tergambar bahwa PKn memiliki peran dalam membina warga negara Indonesia agar menjadi masyarakat yang memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga negara terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memegang prinsip Bhinneka Tungga Ika. Untuk itu, PKn memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan masyarakat multikultural. Hal ini sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menyatakan bahwa:

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan matakuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 37 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003)

Selain itu, dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 secara prinsip telah termaktub di pasal (4), di mana dijelaskan bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), nilai-nilai keagamaan dan kultural”. Berdasarkan konsepsi tersebut, pendidikan tinggi/perguruan tinggi merupakan salah satu instrument dalam konteks pendidikan nasional dalam memprogramkan secara kurikuler PKn sebagai wadah dalam membina warga negara agar menjadi baik dan cerdas. Olehnya itu, perguruan tinggi menjadi

Candra, 2012

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

pilihan *setting* penelitian ini, karena merupakan salah satu wadah dalam membentuk warga negara yang akan memahami nilai demokrasi dan prinsip multikultural itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pandangan Zuhria (2011:13) yang mengungkapkan bahwa:

Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan adalah tempat persemaian wacana multikulturalisme dan demokrasi. Strategi taktik pendidikan multikulturalisme diabdikan untuk menciptakan generasi-generasi yang sadar akan keragaman budaya, di samping memberikan landasan teoretik untuk mencari sebab-sebab konflik dan kekerasan yang bersinggungan dengan keragaman itu.

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan formal dipandang sebagai pintu gerbang untuk melaksanakan tugas pengembangan budaya bagi mahasiswa. Maka perguruan tinggi harus memiliki kekuatan strategis untuk menciptakan budaya positif sesuai dengan falsafah masyarakat. Mengapresiasikan falsafah masyarakat yang didalamnya menghargai pluralitas berarti terdapat ciri-ciri pendidikan yang berorientasikan kepentingan multikultural. Apabila pendekatan-pendekatan pendidikan multikultural tersebut dapat dilaksanakan, dengan sendirinya lahir kebudayaan perguruan tinggi yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Dengan demikian, perguruan tinggi harus merupakan suatu motor penggerak dalam perubahan struktur masyarakat yang timpang.

Disamping itu perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menggunakan sekaligus mengimplementasikan pendidikan yang mempunyai visi-misi untuk menghargai pluralitas, demokrasi dan humanisme. Melalui pelaksanaan visi-misi tersebut, diharapkan mahasiswa dapat menjadi generasi

Candra, 2012

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

yang selalu menjunjung tinggi moralitas, kedisiplinan, keadilan, kebersamaan, kesetaraan, kepedulian, humanistik, kejujuran, tanggung jawab dalam berperilaku sehari-hari. Pembudayaan ini hanya dapat dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki *power* yang dibangun dari esensi pendidikan multikultural.

Dalam bukunya *Multicultural Education: A Teacher Guide to Linking Context, Process and content*, karya seorang pakar pendidikan multikultural di California State University, Amerika Serikat, Hilda Hernandez mengartikan pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, politik dan pengecualian dalam proses pendidikan (Hernandez, Hilda 1989:6) Pandangan tersebut dapat dimaknai bahwa ruang pendidikan sebagai media transmisi ilmu pengetahuan (*transfer of knowledge*) hendaknya mampu memberikan nilai-nilai multikulturalisme dengan saling menghargai dan menghormati atas realitas yang beragam (pluralis), baik latar belakang maupun basis sosial budaya yang melingkupinya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang sangat strategis dalam mengembangkan pendidikan multikultural melalui wadah PKn yang diprogramkan secara kurikuler yang lebih sistematis dan komprehensif. Namun pertanyaan yang kemudian muncul adalah program

Candra, 2012

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

kurikuler seperti apa yang dibutuhkan sehingga mampu berperan dalam membangun warga negara demokratis khususnya di perguruan tinggi?

Sementara disisi lain, bahasan yang diungkapkan pada bagian awal dinyatakan bahwa masyarakat dan negara-bangsa Indonesia terdiri dari berbagai keragaman yaitu sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, aspirasi politik dan lain sebagainya, sehingga masyarakat dan negara-bangsa Indonesia secara sederhana dapat disebut sebagai masyarakat “multikultural”. Dengan kata lain, tujuan PKN kedepan diharapkan mampu membentuk warga negara yang sadar akan nilai demokrasi dan mampu membentuk kewarganegaraan multikultural.

Konsep multikultural berperan untuk mempersatukan budaya bangsa. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ravitch (1996) menemukan bahwa “*Compare California's pluralistic and New York's particularistic approaches; argues for an education that appreciates diversity and supports commitment to a unified American culture*”. Artinya, melalui pendekatan perbandingan komunitas New York dan California yang pluralistik, mereka menganggap bahwa pentingnya multikultural untuk pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan dukungan tanggung jawab untuk suatu persatuan budaya Amerika. Multikultural yang berperan dalam upaya mempersatukan budaya bangsa, sesuai dengan motto kenegaraan mereka *E Pluribus Unum* atau *Unity in Diversity*, yang serupa dengan Bhineka Tunggal Ika-nya di Indonesia (Supardan, 2004:84-86).

Candra, 2012

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Konsep ini senada dengan apa yang dikemukakan Blum bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi penilaian terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek atas kebudayaan-kebudayaan tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana kebudayaan tertentu mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. (Blum, 2001:16). Sejalan dengan terminologi tersebut, Supardan (2004:8) mengemukakan bahwa kata kunci dalam multikulturalisme ini adalah “perbedaan dan penghargaan”, dua kata yang selama ini sering dikonfrontasikan.

Beberapa konsep yang dikemukakan tersebut, secara mendalam dapat pula dimaknai bahwa pada dasarnya konsep multikulturalisme mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, kesempatan kerja dan usaha, hak asasi manusia, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, tingkat serta mutu produktivitas serta berbagai konsep lainnya yang lebih relevan relevan (Rex Jhon 1985, Fay Brian 1996; dan Suparlan, 2002). Dalam konteks pendidikan, hal ini sejalan dengan pandangan Hilda Hernandez (1989) yang mengartikan pendidikan multikultural sebagai sebuah konsep pendidikan tidak hanya menyangkut tentang budaya tetapi bagaimana kebudayaan itu bekerja melalui pranata-pranata sosial. Sebagai sesuatu ide atau ideologi, multikulturalisme terserap ke dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial,

Candra, 2012

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

kehidupan ekonomi, dan bisnis, kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya di dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pemikiran dan konsepsi tentang multikulturalisme yang diuraikan tersebut, harus diakui bahwa multikulturalisme kebangsaan Indonesia belum sepenuhnya dipahami oleh segenap masyarakat sebagai sesuatu yang *given*, takdir Tuhan, dan bukan bentukan manusia. Memang masyarakat telah memahami sepenuhnya bahwa setiap manusia terlahir berbeda, baik secara fisik maupun non fisik, tetapi nalar kolektif masyarakat belum bisa menerima realitas bahwa setiap individu atau kelompok tertentu memiliki sistem keyakinan, budaya, adat, agama, ekonomi, sosial, politik yang berbeda.

Nalar kolektif masyarakat tentang multikultural kebangsaan Indonesia masih terkooptasi oleh logosentrisme tafsir hegemonik yang syarat akan prasangka, kecurigaan, bisa kebencian, dan reduksi terhadap kelompok yang berada diluar dirinya (*the other*). Akibatnya ikatan-ikatan sosial melalui kolektivitas dan kerjasama hanya berlaku didalam kelompoknya sendiri (*in group*), tidak berlaku bagi kelompok lain (*other group*). Buktinya, konflik dan kekerasan hingga kini masih terjadi dalam bentuk dan motif yang beragam di beberapa wilayah Indonesia, termasuk di lingkungan perguruan tinggi.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Jumadi tahun 2009 tentang “dinamikan konflik sosial dalam bentuk tawuran mahasiswa yang berujung pada perilaku kekerasan yang terjadi di kota Makassar. Dalam studi tersebut, dihasilkan beberapa temuan bahwa perubahan fungsi konflik justru mengarah pada tindakan

Candra, 2012

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

negatif, dengan munculnya prasangka sosial, diskriminasi, dominasi, sensitivitas kepercayaan, etnocenterisme di antara kelompok yang berbeda, meningkatkan situasi dan kondisi krisis dan konflik yang mengarah pada kecenderungan dari sikap konflik berubah menjadi perilaku destruktif. Kondisi dan situasi tersebut menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya konflik sosial antar mahasiswa yang berujung pada tindakan kekerasan. Disamping itu tidak berfungsinya secara efektif norma dan nilai yang mengikat antara pelaku dan aktor berpotensi konflik sosial ini berujung pada tindakan atau perilaku destruktif. Dinamika sosial tawuran mahasiswa sebagai suatu fenomena sosial dari konflik sosial yang berujung pada perilaku destruktif, menarik untuk dikaji dan mencari solusi yang tepat untuk mencegah konflik berikutnya yang juga rentan terjadi di wilayah Indonesia lainnya. Hal ini tentu menjadi persoalan bagi pendidikan Indonesia, khususnya di pendidikan tinggi/ perguruan tinggi.

Selain itu, konflik dan anarkis kelompok masyarakat pada beberapa wilayah di Indonesia, baik sebelum pelaksanaan pemilu pada 23 Juni 2010 maupun hari "H" dan pasca-pelaksanaan telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian pada masyarakat maupun fasilitas publik. Itu terjadi antara lain di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan dan sejumlah daerah lainnya. Realitas ini rentan dipicu karena pemilih masih terjebak pada pragmatisme kepentingan dan masih kuatnya hubungan etnisitas, agama dalam menentukan pilihannya. (Arsyad, 2010). Untuk mengantisipasi potensi negatif secara berkepanjangan di masa depan, perlu dipikirkan dalam dunia pendidikan formal dan non formal serta

Candra, 2012

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

kelompok prodemokrasi melakukan pendidikan multikultural kepada warga negara. Hal ini dimaksudkan agar warga negara memiliki kepekaan dalam menangkap dan menghadapi gejala dan masalah sosial politik yang berakar pada perbedaan cara pandang dan poros politik yang berbeda.

Belajar dari “pesta demokrasi lokal” dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi spirit baru terbangunnya kesadaran komunalitas berdasarkan emosi komunitas ras, etnis, agama dan budaya yang cenderung “semu” superior dan eksklusif. Selanjutnya rentan menjadi pemicu konflik (disadari atau tidak disadari). Salah satu upaya strategis dan efektif dalam mendorong penguatan proses demokrasi lokal yang berkualitas dan bermafaat pada kehidupan masyarakat adalah melaksanakan pendidikan berbasis multikulturalisme yang menekankan pada kesadaran sikap dan perilaku masyarakat yang simpatik, respek, apresiatif, dan empati yang pada gilirannya dapat membentuk kesadaran berdemokrasi bagi warga negara. (Arsyad, 2010). Hal ini sejalan dengan pandangan Azra bahwa “multikulturalisme merupakan landasan budaya yang terkait dengan pencapaian *civility* (keadaban), yang amat esensial bagi terwujudnya demokrasi yang berkeadaban, dan keadaban demokrasi” (Budimansyah dan Suryadi, 2008:30).

Untuk itu, dalam konteks membangun tatanan masyarakat dan tatanan sosial yang kokoh, nilai-nilai kearifan (kearifan sosial dan kearifan budaya) dapat dijadikan sebagai tali pengikat dalam upaya bersosialisasi dan berinteraksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan

Candra, 2012

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

kelompok. Dengan nilai kearifan sosial dan kearifan budaya, akan berusaha mengeliminir berbagai perselihan dan konflik budaya yang kurang kondusif. Tatanan kehidupan sosial masyarakat yang multikultural akan terwujud dalam perilaku yang saling menghormati, menghargai perbedaan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan dan menjaga satu dengan lainnya dalam prinsip-prinsip perbedaan tersebut. Untuk itu, harus berusaha untuk mengeliminir atau menghilangkan hal yang selalu menjadi emberio atau mendasari terjadinya konflik, yaitu "(1) prasangka historis, (2) diskriminasi, dan (3) perasaan superioritas *in-group feeling* yang berlebihan dengan menganggap inferior pihak yang lain (*out-group*)" (Puwasito, 2003:147).

Mengacu pada pandangan dan konsep yang dikemukakan di atas, konsep multikulturalisme mempunyai relevansi makna dan fungsi yang tepat. Konsep multikulturalisme menjadi penting untuk dikembangkan dan diinternalisasikan dalam proses transformasi nilai-nilai masyarakat dan bangsa yang beragam ini. Sebab prinsip-prinsip dasar multikulturalisme mengakui dan menghargai keberagaman kelompok masyarakat seperti etnis, ras, budaya, gender, strata sosial, agama, perbedaan kepentingan, keinginan, visi, keyakinan dan tradisi yang akan sangat membantu bagi terwujudnya perubahan format perilaku sosial yang kondusif dan sangat menjanjikan ditengah kehidupan masyarakat dan bangsa yang majemuk. Sarana terbaik dan strategis yang digunakan untuk membangun dan mensosialisasikan konsep multikulturalisme agar melahirkan perilaku sosial kondusif, "kearifan sosial", "kearifan budaya" dan "kearifan moral" atau akhlak

Candra, 2012

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

adalah melalui “pendidikan multikultural”. Dimana pendidikan multikultural mengakui adanya keragaman etnik dan budaya dari masyarakat suatu bangsa, sebagaimana dikatakan Stavenrager:

Religious, linguistic, and national minorities, as well as indigenous and tribal peoples were often subordinated, sometimes forcefully and against their will, to the interest of the state and the dominant society. While many people...had to discard their own cultures, languages, religions and traditions, and adapt to the alien norms and customs that were consolidated and reproduced through national institutions, including the educational and legal system. (Stavenhagen, 1996: 15)

Dalam literatur penelitian Internasional telah banyak disimpulkan tentang kekuatan pendidikan multikultural dapat menekan konflik etnik pada sebuah masyarakat yang berbudaya plural (*cultural pluralism*). Hawkins (1972) menunjukkan bahwa pendidikan multikultural sangat efektif untuk meningkatkan kesadaran terhadap persamaan derajat (*equality*), demokratis, toleransi dan rasionalitas antar budaya. Hawkins juga menyimpulkan dengan rancangan kurikulum pendidikan multikultural yang baik, maka kekuatan purbasangka dan diskriminasi etnik dapat ditekan secara maksimal. Pendidikan multikultural dilaporkan juga sangat efektif sebagai alat pengakomodasi “dominasi kekuasaan” salah satu etnik atau budaya (Suparlan, 2002:27).

Studi lain yang dilakukan oleh Nurul Zuhria tahun 2011, dengan melakukan penelitian tentang pengembangan model PKn multikultural berbasis kearifan lokal, menghasilkan beberapa hal diantaranya adalah model pendidikan kewarganegaraan multikultural berbasis kearifan lokal dapat meningkatkan kompetensi kewarganegaraan multikultural mahasiswa di lingkungan perguruan

Candra, 2012

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

tinggi. Keefektifan model PKn multikultural berbasis kearifan lokal untuk meningkatkan kompetensi kewarganegaraan multikultural mahasiswa tergantung pada penggunaan desain, metode, dan sintak pembelajaran inkuiri sosial secara benar dan kontekstual dalam proses perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan.

Dari berbagai studi dan kajian terdahulu maka peran Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dalam mengadopsi pendidikan multikultural, untuk dipikirkan bagaimana diberlakukan dalam pendidikan sekolah dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstra-kurikuler atau menjadi bagian kurikulum sebagai mata pelajaran terpisah, berdiri sendiri (*separated*) atau sebaiknya terpadu atau terintegrasi (*integrated*). (Azra, 2002)

Dalam konteks ini, salah satu bidang kajian yang dapat menjadi wahana bagi pendidikan multikultural adalah PKn. Mahfud menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara majemuk, baik dalam segi agama, suku bangsa, golongan, maupun budaya lokal, perlu menyusun konsep pendidikan multikultural sehingga menjadi pegangan untuk memperkuat identitas Nasional. Pelajaran PKn yang telah diajarkan di sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sebaiknya disempurnakan dengan memasukkan pendidikan multikultural, seperti budaya lokal antar daerah kedalamnya, agar generasi muda bangga sebagai bangsa Indonesia. (Mahfud, 2010: 224). Dalam temuan Arif juga menegaskan bahwa PKn (*civic education*), baik sebagai program kurikuler, program sosial kultural, maupun program akademik/kajian ilmiah dapat menjadi wahana pendidikan multikultural

Candra, 2012

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Indonesia. (Arif, 2008: 224). Sejalan dengan pandangan tersebut Budimansyah dan Suryadi (2008:31) mengemukakan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan yang berperan penting dalam pendidikan multikultural mempersiapkan peserta didik menjadi warganegara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan disemua jenjang dan jenis sekolah secara pragmatik memiliki *psyco-pedagogis*, yaitu membina warga negara yang demokratis dalam ruang lingkup pendidikan di lembaga pendidikan fomal maupun formal, Sapriya dan Winataputra (2010:1.2), menyatakan bahwa tugas PKn dengan paradigma barunya mengembangkan tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelegence*), membina tanggungjawab warga negara (*civic responsibility*) dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional dan sosial sehingga paradigma baru PKn bercirikan multidimensional. Oleh karenanya, PKn dengan paradigma baru mengamanatkan, agar demokrasi dilaksanakan secara cerdas dan berbudaya. Jadi, bukan demokrasi yang dilaksanakan dengan cara memaksakan kehendak tanpa dikemas dalam bingkai peraturan perundang-undangan. Apabila demokrasi diterjemahkan dengan cara destruktif, intimidatif dan tidak menggunakan akal sehat, maka akan terjadi anarkisme sehingga menyalahi nilai-nilai demokrasi dan bertentangan dengan

Candra, 2012

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

tujuan PKn sebagaimana tercantum dalam standar Isi PKn (2006: 2) yang hendak mengembangkan kemampuan:

1) berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan, 2) berpartisipasi secara aktif dan bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi; 3) berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; 4) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Melalui PKn sebagai wahana pendidikan multikultural, yang tidak hanya menanamkan pemahaman lebih benar tentang demokrasi, HAM, pluralitas, respek dan toleransi diantara berbagai komunitas, tetapi juga pengalaman berdemokrasi keadaban dan multikultural. Maka dengan pendidikan multikultural diharapkan dapat mendukung pengembangan demokratis yang tengah tumbuh di tengah masyarakat Indonesia yang multi etnis, suku bangsa, budaya, agama, ekonomi, politik untuk menuju masyarakat madani Indonesia atau Indonesia baru yang dicita-citakan yang mampu membentuk warga negara yang memiliki kesadaran demokratis.

Hanya saja kenyataan praksis di lapangan saat ini, bahwa PKn yang merupakan salah satu ujung tombak dan bagian dari proses membangun cara hidup multikultural dalam memperkuat wawasan kebangsaan dan penghargaan akan keragaman serta bentukan warga negara yang sadar akan nilai demokrasi justru belum menggembirakan, kurang mengembangkan dimensi multikultural, bahkan kehilangan aktualitasnya karena hanya menekankan pada

Candra, 2012

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

psikologi kognitif yang terjebak pada penguasaan pengetahuan (*knowledge*) belaka sementara dimensi lain (afektif dan psikomotorik) terabaikan.

Permasalahan lainnya yang sedang dihadapi oleh PKn sebagai program kurikuler masih menyisahkan sejumlah kendala. *Pertama*, proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih menekankan pada dampak instruksional (*instructional effects*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content matery*) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja, sedangkan pengembangan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotorik) dan pemerolehan dampak pengiring (*nurturant effects*) sebagai “*hidden curriculum*” belum mendapat perhatian sebagaimana mestinya. *Kedua*, pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik melalui perlibatannya secara proaktif dan interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas (intra dan ekstra kurikuler) sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku peserta didik/mahasiswa. *Ketiga*, pelaksanaan kegiatan ekstra-kurikuler sebagai wahana sosio-pedagogis untuk mendapatkan “*hands-on experience*” juga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktek pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam berkehidupan yang demokratis (Budimansyah, 2009). Berbagai persoalan tersebut, merupakan masalah empirik bagi peran PKn sebagai lokomotif dalam membangun kesadaran demokrasi warga negara yang multikultural.

Candra, 2012

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Salah satu yang diduga menjadi penyebab, karena belum adanya konsep yang jelas bagi pengembangan PKn berbasis pendidikan multikultural yang lebih sistematis dan komprehensif di perguruan tinggi, sehingga para praktisi di lapangan belum secara sungguh-sungguh menerapkan PKn berbasis multikultural bagi pembentukan warga negara demokratis.

Dari latar belakang pemikiran di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian tentang analisis kebutuhan pendidikan multikultural melalui PKn berbasis kompetensi dalam membangun warga negara demokratis. Penelitian ini dibatasi pada sebuah studi atau kajian yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi, melakukan analisis kebutuhan pembelajaran PKn sebagai wahana pendidikan multikultural secara akademis dan kurikuler sehingga mampu menemukan konsep dan strategi implementasi pendidikan multikultural melalui PKn di perguruan tinggi.

Salah satu perguruan tinggi yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini adalah perguruan tinggi kota Jakarta yakni Universitas Negeri Jakarta pada jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan (PGSD FIP). Pemilihan *setting* penelitian ini dikarenakan di Jurusan PGSD FIP UNJ sudah mulai menerapkan pembelajaran PKn sebagai wahana pendidikan multikultural dan juga telah ada program mata kuliah peminatan PKn yakni Pendidikan Multikultural sebagai mata kuliah pilihan yang dikembangkan oleh dosen pada rumpun mata kuliah PKn. Disamping itu, di kampus tersebut memiliki mahasiswa

Candra, 2012

**Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam
Membangun Warga Negara Demokratis**

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

yang relatif heterogen dilihat dari segi suku, agama, tingkatan sosial dan ekonomi sehingga sesuai dengan kajian yang akan diteliti oleh peneliti.

B. RUMUSAN MASALAH

Penelitian ini merupakan sebuah investigasi terkendali yang dirancang dengan melakukan suatu analisis kebutuhan untuk mengkaji PKn sebagai wahana pendidikan multikultural (*multicultural education*) sebagai salah satu wadah bagi pembangunan kesadaran berdemokrasi bagi warga negara khususnya di perguruan tinggi. Untuk itu, secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dan implementasi pembelajaran PKn sebagai wahana pendidikan multikultural dalam membangun warga negara demokratis di perguruan tinggi? Untuk mempermudah penulis dalam meneliti, pokok permasalahan tersebut dijabarkan menjadi sub permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan materi multikultural melalui pembelajaran PKn dalam membangun warga negara demokratis di di Jurusan PGSD FIP UNJ?
2. Bagaimana desain pembelajaran PKn sebagai wahana pendidikan multikultural dalam membangun warga negara demokratis di Jurusan PGSD FIP UNJ?
3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran PKn sebagai wahana pendidikan multikultural dalam membangun warga negara demokratis di Jurusan PGSD FIP UNJ?

Candra, 2012

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

4. Bagaimana evaluasi hasil pembejalaran PKn sebagai wahana pendidikan multikultural dalam membangun warga negara demokratis di Jurusan PGSD FIP UNJ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Sebagaimana yang terdapat dalam rumusan masalah dalam penelitian maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dan implementasi pembelajaran PKn sebagai wahana pendidikan multikultural dalam membangun warga negara demokratis di perguruan tinggi.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui diantaranya:

- a. Pengembangan materi multikultural melalui pembelajaran PKn dalam membangun warga negara demokratis di di Jurusan PGSD FIP UNJ.
- b. Desain pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan multikultural dalam membangun warga negara demokratis di Jurusan PGSD FIP UNJ.
- c. Pelaksanaan pembelajaran PKn sebagai wahana pendidikan multikultural dalam membangun kesadaran warga negara demokratis di Jurusan PGSD FIP UNJ.
- d. Evaluasi hasil pembejalaran PKn sebagai wahana pendidikan multikultural dalam membangun kesadaran warga negara demokratis di Jurusan PGSD FIP UNJ.

Candra, 2012

**Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam
Membangun Warga Negara Demokratis**

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis bagi pengembangan model pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan multikultural dalam membangun warga negara demokratis di perguruan tinggi.

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi kontribusi dalam membangun ide dan konsep-konsep dasar tentang kebutuhan pendidikan multikultural melalui PKn. Lebih lanjut hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan model pendidikan yang lebih memperhatikan kebutuhan pebelajar, baik secara akademik maupun sosio-kultural.

2. Manfaat Praktis

Signifikansi praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak, diantaranya adalah:

- a. Dapat dijadikan pengetahuan oleh kalangan pendidikan tentang cara mengembangkan ide dan konsep yang sesuai dengan kebutuhan pebelajar menjadi sebuah kurikulum di perguruan tinggi.
- b. Dapat menjadi proto tipe untuk memprogramkan suatu mata kuliah Pendidikan Multikultural ke dalam kurikulum perguruan tinggi atau terintegrasi dalam beberapa mata mata kuliah yang terkait.
- c. Temuan penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan panduan/modular untuk memantau dan menilai kebutuhan akademik dan sosio-kultural pebelajar di perguruan tinggi yang relevan dengan PKn dan pendidikan multikultural.

Candra, 2012

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- d. Hasil penelitian ini bisa juga dipergunakan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin mengangkat kajian tentang PKn sebagai wahana pendidikan multikultural.
- e. Secara khusus hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan dan referensi teoritis-empiris bagi masyarakat dan pemerintah dalam mematangkan kebijakan yang terkait dengan sosialisasi dan penyiapan pendidikan multikultural di sekolah dan perguruan tinggi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, penulis akan menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I tentang pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan dalam beberapa sub bab antara lain; (1) Latar Belakang, (2) Rumusan masalah, (3) Tujuan penelitian, (4) Manfaat Penelitian dan (5) Sistematika penulisan.

Bab II membahas kajian teoritis/kajian pustaka yang berisi deskripsi, analisis dan rekonseptualisasi peneliti. Pada bab ini terbagi dalam sub bab antara lain; (1) Pendidikan Kewarganegaraan, (2) Pendidikan Multikultural, (3) Warga Negara, (4) Perkembangan Demokrasi, (5) Warga Negara Demokratis, (6) Peran PKn Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis, (7) Hasil Penelitian Terdahulu, dan (8) Kerangka Pemikiran.

Bab III membahas metode penelitian. Dalam bab ini terbagi dalam sub bab antara lain; (1) Lokasi dan Subjek, (2) Pendekatan dan Metode, (3) Defenisi

Candra, 2012

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis

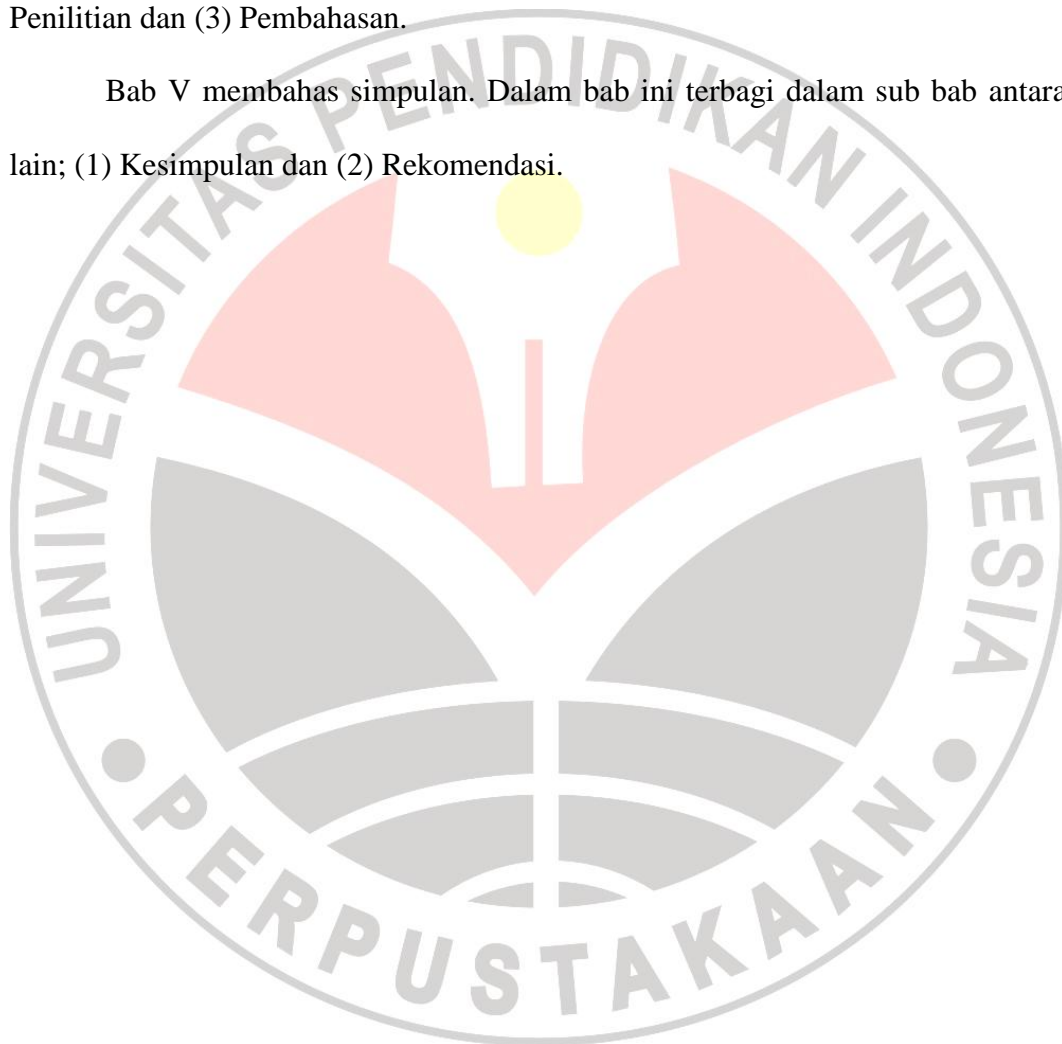
: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Konseptual, (4) Teknik Pengumpulan Data, (5) Analisis Data, dan (6) Uji Validitas Data.

Bab IV membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini terbagi dalam sub bab antara lain; (1) Deskripsi Lokasi Penelitian (2) Hasil Penelitian dan (3) Pembahasan.

Bab V membahas simpulan. Dalam bab ini terbagi dalam sub bab antara lain; (1) Kesimpulan dan (2) Rekomendasi.



Candra, 2012

Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam Membangun Warga Negara Demokratis

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu



Candra, 2012

**Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Multikultural Dalam
Membangun Warga Negara Demokratis**

: Penelitian *Grounded Theory* di Universitas Negeri Jakarta

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu